

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2014, Presiden Joko Widodo secara resmi menyampaikan konsep Poros Maritim Dunia dalam pidato Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-9 *East Asia Summit* pada 13 November 2014 di Myanmar.<sup>1</sup> Konsep ini merupakan visi bidang kelautan Indonesia untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional sesuai serta mampu berkontribusi secara positif pada keamanan dan perdamaian kawasan dan dunia.<sup>2</sup> Secara geografis dan potensi sumber daya alam, Indonesia mendukung untuk poros maritim dunia. Indonesia memiliki wilayah luas yang didominasi oleh 75% wilayah perairan<sup>3</sup> serta 11 Wilayah Pengelolaan Perairan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) dengan potensi sumber daya ikan di Indonesia mencapai 9,9 juta ton.<sup>4</sup>

Salah satu permasalahan dalam pemanfaatan perikanan di Indonesia adalah *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUU Fishing)*. *IUU Fishing* dapat diartikan sebagai aktivitas penangkapan ikan yang dilakukan secara ilegal, tidak

<sup>1</sup>Kemlu RI, “Presiden Jokowi Deklarasikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia”, <https://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Presiden-Jokowi-Deklarasikan-Indonesia-Sebagai-Poros-Maritim-Dunia.aspx> (diakses 10 Februari 2018)

<sup>2</sup>Rinnay Nitrabening Wahyunisa, “Diplomasi Maritim Indonesia Dalam Kemitraan ASEAN dengan Mitra Wicara”, *Membangun Kiprah Maritim Indonesia di Kawasan*, Laporan Masyarakat ASEAN Edisi 14, 2016, hal 13 <https://www.kemlu.go.id/Majalah/ASEAN%20Edisi%2014%202017.pdf> (diakses 10 Februari 2018)

<sup>3</sup> Richarunia Wenny Ikhtiari, *Strategi Keamanan Maritim Indonesia Dalam Menganggulangi Ancaman Non-Traditional Security, Studi Kasus: Illegal Fishing Periode Tahun 2005-2010*, Tesis, Universitas Indonesia, 2011, hal 7

<sup>4</sup>Badan Pusat Statistik, “Statistik Sumber Daya Perikanan dan Perikanan 2017”, hal 9, <https://www.bps.go.id/publication/2017/12/21/c2451f58814e91d71124d541/statistik-sumber-daya-laut-dan-pesisir-2017.html>, (diakses 2 Maret 2018)

dilaporkan dan tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.<sup>5</sup> Berdasarkan data *Food and Agriculture Organization* (FAO), kerugian Indonesia akibat dari *IUU Fishing* mencapai sekitar Rp 30Triliun/Tahun.<sup>6</sup> Kemudian *IUU Fishing* juga mengancam keberlangsungan lingkungan laut, sumber daya pangan, keamanan dan kedaulatan negara serta memicu kejahatan terorganisir lainnya seperti perdagangan dan penyelundupan manusia, perbudakan, perdagangan gelap narkoba dan senjata.<sup>7</sup> Dampak *IUU Fishing* yang besar dan merugikan Indonesia, menjadikan *IUU Fishing* sebagai salah satu agenda nasional dan strategis pemerintahan Joko Widodo.<sup>8</sup>

*IUU Fishing* dilakukan oleh Kapal Ikan Indonesia (KII) dan sebagian besarnya dilakukan oleh Kapal Ikan Asing (KIA). Beberapa negara yang melakukan aktivitas *IUU Fishing* di wilayah Perairan Indonesia adalah Vietnam, Malaysia, Filipina Tiongkok, Thailand, Hongkong, dan Taiwan.<sup>9</sup> Vietnam merupakan negara pelaku *IUU Fishing* tertinggi diantara negara-negara lainnya yang melakukan *IUU Fishing* di Perairan Laut Natuna Utara sekaligus tertinggi di Perairan Indonesia. Dari total 66 kapal ikan asing yang ditangkap terkait penangkapan ikan secara ilegal

---

<sup>5</sup> Dina Sunyowati, "Dampak Kegiatan IUU-Fishing di Indonesia", Seminar *Peran dan Upaya Penegak Hukum dan Pemangku Kepentingan dalam Penanganan dan Pemberantasan IUU Fishing di Wilayah Perbatasan*, Surabaya, 2014, [https://nanopdf.com/download/iuu-fishing-fh-unair-universitas-airlangga\\_pdf](https://nanopdf.com/download/iuu-fishing-fh-unair-universitas-airlangga_pdf) (diakses 11 Februari 2018)

<sup>6</sup> Bilal Ramadhan, "Astaga, Negara Dirugikan Rp 101 T dari Pencurian Ikan", *Republika*, <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/04/18/n47hwb-astaga-negara-dirugikan-rp-101-t-dari-pencurian-ikan> (diakses 3 Mei 2018)

<sup>7</sup> Risha Jilian Chaniago, "Testing The Water, Penguatan Kerja Sama Penanganan IUU Fishing Melalui ASEAN Regional Forum", *Membangun Kiprah Maritim Indonesia di Kawasan*, Laporan Masyarakat ASEAN EDISI 14, 2016, hal 6-7

<sup>8</sup> Anni Yulianti, Menjaga NKRI di Laut, *Membangun Kiprah Maritim Indonesia di Kawasan*, Laporan Masyarakat ASEAN EDISI 14, 2016, hal 11

<sup>9</sup> Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia, *Laut Masa Depan Bangsa, (Kedaulatan, Keberlanjutan, Kesejahteraan)*, (Jakarta, 2017), hal 21, [http://kkp.go.id/wp-content/uploads/2017/12/BUKU\\_PUTIH\\_NEW.pdf](http://kkp.go.id/wp-content/uploads/2017/12/BUKU_PUTIH_NEW.pdf) (diakses 9 Maret 2018)

hingga Maret 2017, terdapat 54 kapal ikan yang berbendera Vietnam.<sup>10</sup> Perairan Laut Natuna Utara merupakan wilayah Perairan Indonesia yang dikategorikan paling rawan *IUU Fishing*.<sup>11</sup>

Dalam memberantas *IUU Fishing*, Presiden Joko Widodo kemudian membentuk Satuan Tugas 115 (Satgas 115) sebagai Satgas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (*Illegal Fishing*) pada 19 Oktober 2015.<sup>12</sup> Sejak didirikan hingga 2017, Satgas 115 telah menenggelamkan kapal ikan yang melakukan tindakan *IUU Fishing* di Perairan Indonesia.<sup>13</sup> Sebanyak 317 kapal telah ditenggelamkan dan KIA Vietnam merupakan KIA terbanyak yang ditenggelamkan yaitu sebanyak 142 kapal.<sup>14</sup>

Bagi Vietnam, sektor perikanan merupakan sektor penting. Tingkat pertumbuhan rata-rata sektor ini adalah 7,9% per tahun yang berkontribusi besar pada industrialisasi dan modernisasi pertanian dan sektor pedesaan di Vietnam sendiri. Sejak 2006, Vietnam secara global masuk dalam 10 besar negara pengekspor utama perikanan. Secara signifikan, perikanan merupakan ekspor kelima terbesar bagi Vietnam dan menyumbang sekitar 4-5% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Vietnam.<sup>15</sup>

---

<sup>10</sup> Kementerian Kelautan dan Perikanan, hal 40

<sup>11</sup> KKP News, “KKP: Perairan Natuna Paling Rawan IUU Illegal Fishing”, <http://news.kkp.go.id/index.php/kkp-perairan-natuna-paling-rawan-illegal-fishing/> diakses (18 Februari 2018)

<sup>12</sup> Kementerian Kelautan dan Perikanan, hal 38

<sup>13</sup> Kementerian Kelautan dan Perikanan, hal 42

<sup>14</sup> Kementerian Kelautan dan Perikanan

<sup>15</sup> Hong TKN, Phan TTH, Tran TNT, Philippe L. “Vietnam’s Fisheries and Aquaculture Development’s Policy: Are Exports Performance Targets Sustainable”, *Oceanogr Fish Open Access J.* 2017; 5(4), hal 2

Dalam upaya mengatasi *IUU Fishing* terdapat beberapa kendala yang dialami oleh Indonesia, salah satu contohnya pada tahun 2017 yaitu insiden penangkapan bentrokan antara kapal patroli Indonesia dan *Vietnam Coast Guard* (VCG) yang berakhir dengan tenggelamnya KIA Vietnam. Kapal VCG berusaha menghalangi pihak Indonesia dalam menangkap kapal ikan Vietnam di ZEE Indonesia.<sup>16</sup> Selain itu Vietnam juga merasa “sangat prihatin” terkait dengan kebijakan penenggelaman kapal oleh Indonesia dan berharap Indonesia akan memperlakukan nelayan dan kapal ikan Vietnam berdasarkan semangat persahabatan tradisional dan kemitraan strategis.<sup>17</sup>

Pada dasarnya, setiap proses penangkapan KIA hingga pada penenggelaman kapal merupakan bentuk penegakan hukum oleh Indonesia terhadap pelanggaran kedaulatan oleh KIA di perairan Indonesia.<sup>18</sup> *IUU Fishing* merupakan ancaman berdimensi penyerangan non –militer dengan skala pelanggaran kedaulatan oleh *non-state actor*.<sup>19</sup> Kebijakan dalam penanganan *IUU Fishing* oleh Indonesia didasarkan pada aturan hukum yang sesuai.

Indonesia dan Vietnam sendiri memiliki hubungan kerjasama yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sejak tahun 2003, kedua negara sepakat

---

<sup>16</sup> Tiara Sutari, “Bentrok dengan Vietnam, Indonesia Pilih Solusi Diplomatik”, CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20170523203334-106-216829/bentrok-dengan-vietnam-indonesia-pilih-solusi-diplomatik>, (dikases 18 April 2018)

<sup>17</sup> Prashanth Parasmeswaran, , “Vietnam ‘Deeply Concerned’ by Indonesia’s War on Illegal Fishing”, The Diplomat, <https://thediplomat.com/2015/08/vietnam-deeply-concerned-by-indonesias-war-on-illegal-fishing/> diakses 20 April 2018

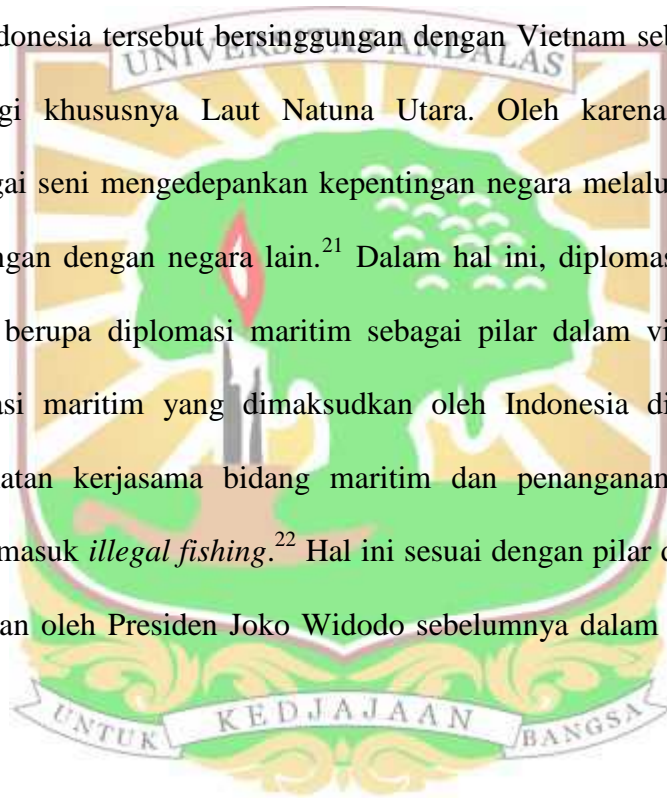
<sup>18</sup> Tabita Diela, “Soal Penenggelaman Kapal Asing, Kedaulatan Negara tak Bisa di Tawar”, Kompas, <https://ekonomi.kompas.com/read/2014/11/28/0530007/Soal.Penenggelaman.Kapal.Asing.Kedaulatan.Negara.Tak.Bisa.Ditawar> (diakses 20 April 2018)

<sup>19</sup> Richarunia Wenny Ikhriari, hal 14



dan menandatangani Deklarasi Kemitraan Komprehensif. Kerjasama kedua negara yang kemudian ditingkatkan menjadi kemitraan strategis yang ditandai dengan penandatanganan *Plan of Action* (PoA). Kerjasama tersebut berupa rencana aksi berbagai bidang kerjasama yakni politik dan pertahanan keamanan, ekonomi, investasi, pertanian dan bidang-bidang lainnya.<sup>20</sup>

Dalam hal ini, Indonesia memiliki kepentingan untuk mengatasi *IUU Fishing*. Kepentingan Indonesia tersebut bersinggungan dengan Vietnam sebagai pelaku *IUU Fishing* tertinggi khususnya Laut Natuna Utara. Oleh karena itu, dibutuhkan diplomasi sebagai seni mengedepankan kepentingan negara melalui cara-cara damai dalam berhubungan dengan negara lain.<sup>21</sup> Dalam hal ini, diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia berupa diplomasi maritim sebagai pilar dalam visi poros maritim dunia. Diplomasi maritim yang dimaksudkan oleh Indonesia diterapkan melalui usulan peningkatan kerjasama bidang maritim dan penanganan sumber konflik wilayah laut termasuk *illegal fishing*.<sup>22</sup> Hal ini sesuai dengan pilar diplomasi maritim yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo sebelumnya dalam visi pros maritim dunia.



<sup>20</sup> Kemlu Ri, “Republik Sosialis Vietnam”, <https://www.kemlu.go.id/hanoi/id/Pages/Vietnam.aspx>, (diakses 13 Maret 2018)

<sup>21</sup> S.L Roy *Diplomacy*. Diterjemahkan oleh Harwanto, Misrawati (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hal 5

<sup>22</sup> Presiden.go.id, “Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia”, <http://presidenri.go.id/berita-aktual/indonesia-sebagai-poros-maritim-dunia.html>(diakses 10 Februari 2018)

## 1.2 Rumusan Masalah

Pada Era Joko Widodo, Indonesia memiliki Visi Poros Maritim dunia dan didukung oleh keuntungan geografis dan potensi sumber daya laut yang. Namun, terdapat *IUU Fishing* sebagai salah satu permasalahan di wilayah laut Indonesia. *IUU Fishing* telah merugikan Indonesia sebanyak Rp 30 Triliun/tahun serta kerugian berupa ancaman keamanan di wilayah laut. KIA Vietnam merupakan pelaku *IUU Fishing* tertinggi di Perairan Indonesia khususnya yang di perairan Laut Natuna Utara. Indonesia dan Vietnam memiliki hubungan kerjasama kemitraan strategis. Namun, dalam mengatasi *IUU Fishing*, Indonesia memiliki kepentingan yang bersinggungan dengan Vietnam. Oleh karena itu, dibutuhkan diplomasi maritim dalam upaya mengelola hubungan internasional melalui domain maritim. Diplomasi maritim yang dimaksudkan sesuai dengan Visi Poros Maritim oleh Joko Widodo.

## 1.3 Pertanyaan Penelitian

Dengan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini akan menjawab bagaimana Diplomasi Maritim Indonesia terhadap Vietnam dalam Mengatasi *IUU Fishing* Pada Era Joko Widodo?

## 1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Diplomasi Maritim Indonesia terhadap Vietnam dalam mengatasi *IUU Fishing* Pada Era Joko Widodo.

## 1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dan menambah pemahaman bagi kajian ilmu hubungan internasional khususnya terkait diplomasi maritim oleh Indonesia.
2. Secara praksis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan terkait dengan kajian yang diteliti.
3. Menjadi bahan referensi terkait kajian diplomasi maritim bagi penstudi hubungan internasional untuk diteliti lebih lanjut.

### 1.6 Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini, peneliti bersandar pada beberapa kajian pustaka terkait. Pertama, “*Maritime Diplomacy sebagai Strategi Pembangunan Keamanan Maritim Indonesia*” oleh Muhammad Harry Riana Nugraha dan Arfin Sudirman.<sup>23</sup> Tulisan ini menjelaskan bahwa diplomasi maritim merupakan strategi yang dapat digunakan oleh Indonesia dalam mengatasi masalah keamanan maritim seperti perompakan, pencurian ikan dan separatisme. Tulisan ini menjelaskan bahwa Indonesia memiliki kelemahan karena belum mampu berkompetisi pada aspek kebijakan, militer dan kapabilitas diplomasi pada tataran global. Dengan visi *Global Maritime Fulcrum* (GMF), Indonesia dapat menata sektor maritim dengan berfokus pada upaya peningkatan aspek sumber daya manusia dan teknologi melalui pendidikan dan riset serta *joint research* dengan negara lain, penguatan kapabilitas TNI AL sebagai instrumen diplomasi maritim dan pemanfaatan ASEAN sebagai wadah untuk mencapai visi maritim Indonesia.

---

<sup>23</sup>Muhammad Harry Riana Nugraha, Arfin Sudirman, “Maritime Diplomacy sebagai strategi Pembangunan Keamanan Maritim Indonesia”, *Jurnal Wacana Politik*, vol 1, No 2, 2016, hal 175-182

Kajian Pustaka kedua adalah *Diplomasi Maritim Indonesia Terhadap Aktivitas Penangkapan Ikan Ilegal (Illegal Fishing) Oleh Nelayan China di ZEEI Perairan Kepulauan Natuna* oleh Ela Riska.<sup>24</sup> Tulisan ini menjelaskan permasalahan aktivitas *Illegal Fishing* oleh nelayan Tiongkok di Perairan Natuna Utara dan tindakan patroli keamanan Laut Tiongkok yang melanggar Hak Berdaulat Indonesia dan mengganggu penegakan hukum di wilayah yurisdiksi Indonesia. Dalam tulisan ini, dijelaskan bahwa Indonesia memanfaatkan instrumen diplomasi *maritime forces* Indonesia dan unsur pemerintah dalam merespon permasalahan tersebut. Upaya diplomasi maritim tersebut dalam bentuk *navy to navy talk*, aktivitas kunjungan dan pelatihan, kerjasama perikanan dan kerjasama regional ASEAN+China dalam membentuk *Code of Conduct* di Laut Tiongkok Selatan.

Tulisan yang ketiga adalah *Handling of Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* oleh Rodon Pedrason, Yandri Kurniawan dan Purwasandi.<sup>25</sup> Tulisan ini menjelaskan upaya dalam mengatasi *IUU Fishing* oleh Indonesia dan Malaysia melalui diplomasi maritim khususnya diplomasi maritim kooperatif. Dalam tulisan ini, dijelaskan bahwa *IUU Fishing* merupakan ancaman bagi kedua negara yang berdampak pada ekonomi dan keamanan kedua negara. Sehingga, diplomasi maritim kooperatif diperlukan sebagai solusi kepentingan bersama terkait isu *IUU Fishing* tersebut. Dalam penelitian ini juga dijelaskan bahwa kerjasama yang dilakukan oleh kedua negara masih berbentuk kerjasama multilateral melalui ASEAN, sedangkan

---

<sup>24</sup>Ela Riska, "Diplomasi Maritim Indonesia Terhadap Aktivitas Penangkapan Ikan Ilegal (Illegal Fishing) Oleh Nelayan China di ZEEI Perairan Kepulauan Natuna", *Jurnal Prodi Diplomasi Pertahanan*, Vol.3 no.2, 2017, Hal 33-47

<sup>25</sup> Rodon Pedrason, Yandri Kurniawan, Purwasandi, "Handling of Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing", *Jurnal Pertahanan* Vol 2 No 1 2016, hal 71-90



kerjasama bilateral sulit untuk diterapkan. Salah satu penyebabnya karena adanya perbedaan kepentingan politik. Selain itu, kurangnya regulasi dari institusi terkait dari masing-masing negara menjadi permasalahan dalam koordinasi untuk bekerjasama dan berakibat pada munculnya fungsi dan peran ganda yang saling tumpang tindih.

Tulisan yang keempat adalah *Upaya Kerjasama Pemerintah Indonesia-Filipina dalam Memberantas Kegiatan IUU-Fishing di Perbatasan Kedua Negara Khususnya Laut Sulawesi 2014-2016* oleh Exellan Ramadhan Uno.<sup>26</sup> Tulisan ini menjelaskan upaya penanganan permasalahan *illegal fishing* di Laut Sulawesi (perbatasan Indonesia-Filipina) melalui kerjasama yang telah dibentuk antara Indonesia dan Filipina. Kerjasama bilateral antar kedua negara berdasar pada MoU antar kedua negara. MoU ini kemudian diimplementasikan dalam bentuk *Plan Of Action* yang mengatur kerjasama kedua negara dalam mengatasi *IUU Fishing* di Laut Sulawesi yang terdiri dari beberapa poin. Pertama, *E. Marine and Fisheries Cooperation*, bertujuan mengimplementasikan bantuan dalam memberantas *IUU Fishing* dan diatur dalam kerangka *Joint Ministerial Statement* pada RPOA-IUU. Kedua, *Joint Patrol* yang dilakukan oleh angkatan laut Indonesia dan Filipina diatur dalam kerangka *Border Crossing Agreement and Border Patrol Agreement*.

Tulisan yang kelima adalah *Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menanggulangi Illegal Fishing di Kepulauan Riau 2010-2015* oleh Booby Bella

---

<sup>26</sup> Exellano Ramadhan Uno, “Upaya Kerjasama Pemerintah Indonesia-Filipina dalam Memberantas Kegiatan IUU-Fishing di Perbatasan Kedua Negara Khususnya Laut Sulawesi 2014-2016”, *Journal of International Relations*, volume 3, Nomor 4, 2017, hal 138-146

Alamsyah.<sup>27</sup> Tulisan ini menjelaskan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi *IUU Fishing* di wilayah laut Kepulauan Riau dengan potensi perikanan yang kaya. Upaya-Upaya yang dilakukan pemerintah adalah 1) Sistem Pemantauan Kapal Perikanan, berupa pengawasan di wilayah laut Kepulauan Riau dengan menggunakan perangkat teknologi canggih yang berbasis satelit untuk mengetahui pergerakan kapal, 2) Upaya Pengawasan di Perairan Kepulauan Riau, yaitu dengan memperbanyak pos-pos pemantauan di daerah rawan *illegal fishing* khususnya di Perairan Anambas dan Natuna Utara. 3) Penegakan Hukum dalam Kasus *Illegal Fishing* di Kepulauan Riau, yaitu penenggelaman dan perampasan kapal *illegal fishing* oleh pemerintah Indonesia bekerjasama dengan dinas terkait. Dari upaya tersebut kemudian berdampak pada pengurangan jumlah kapal yang melakukan aktifitas *IUU Fishing*.

Dari kajian pustaka yang dilakukan, terdapat perbedaan dengan penelitian ini. Tulisan pertama membahas diplomasi maritim sebagai strategi dalam mengatasi masalah keamanan maritim secara umum. Tulisan kedua membahas penggunaan diplomasi maritim secara bilateral dan multilateral oleh Indonesia yang secara khusus untuk mengatasi *IUU Fishing* oleh nelayan China di ZEEI Laut Natuna. Tulisan kedua ini memiliki objek yang berbeda yaitu China. Tulisan ketiga membahas penggunaan diplomasi maritim oleh Indonesia melalui diplomasi maritim kooperatif dengan Malaysia dalam mengatasi *IUU Fishing*. Tulisan ketiga ini berfokus pada kerjasama Indonesia dan Malaysia. Tulisan keempat membahas upaya

---

<sup>27</sup> Bobby Bella Alamsyah, "Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menanggulangi Illegal Fishing di Kepulauan Riau 2010-2015", *ejournal Hubungan Internasional* Volume 5 Nomor 4, Tahun 2017

Indonesia dalam mengatasi *IUU Fishing* di Laut Sulawesi melalui kerjasama dengan Filipina. Tulisan keempat ini berbeda dengan berfokus pada kerjasama Indonesia dengan Filipina. Tulisan kelima membahas upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi *IUU Fishing* di Kepulauan Riau. Tulisan kelima ini berfokus pada upaya pemerintah secara domestik. Secara keseluruhan, tulisan-tulisan pada kajian pustaka di atas memiliki perbedaan dari segi aktor yang terlibat dalam upaya Indonesia mengatasi *IUU Fishing*.

Perbedaan kajian pustaka di atas dengan penelitian ini adalah penelitian ini berfokus pada *IUU Fishing* yang dilakukan oleh kapal ikan Vietnam sebagai pelaku *IUU Fishing* tertinggi di Perairan Indonesia khususnya Perairan Laut Natuna Utara. Dalam hal ini, Perairan Laut Natuna Utara merupakan salah satu wilayah paling rawan *IUU Fishing*. Kemudian, tulisan ini berfokus pada diplomasi maritim pada Era Joko Widodo sebagai bagian dari visi poros maritim dunia. Sehingga, penelitian ini berbeda dengan tulisan-tulisan dalam kajian pustaka diatas.

## **1.7 Kerangka Konseptual**

### **1.7.1 Diplomasi Maritim**

Diplomasi adalah manajemen dalam hubungan internasional dan diplomasi maritim adalah manajemen hubungan internasional melalui domain maritim. Hal ini tidak dimaksudkan bahwa penggunaan diplomasi untuk mengelola ketegangan

maritim seperti melalui kodifikasi hukum internasional. Tetapi, penggunaan aset maritim untuk mengelola hubungan itu sendiri.<sup>28</sup>

Menurut Le Miere terdapat beberapa alasan mengapa sebuah negara melakukan diplomasi maritim, yaitu:

#### 1. Nasionalisme dan Kedaulatan

Perkembangan dunia internasional saat ini telah mendorong negara-negara maju menurunkan nasionalisme dalam aspek pertahanan dengan diplomasi maritim kooperatif melalui organisasi multilateral dan disaat yang sama telah mendorong negara berkembang untuk meningkatkan proyeksi daya serta melindungi kepentingan nasional berupa ekonomi yaitu perdagangan dan investasi dengan mengamankan jalur komunikasi laut, operasi lanjutan, usaha komersial dan keselamatan warganya sehingga mendorong adanya diplomasi maritim segala bentuk.<sup>29</sup>

#### 2. Hukum Internasional

Cara lebih lanjut bagi negara dalam membatasi kedaulatan mereka agar menjadi saling menguntungkan adalah melalui adopsi dan kodifikasi hukum internasional. Dalam hal ini, hukum internasional terkait domain maritim di atur dalam UNCLOS. Dalam UNCLOS, terdapat ketentuan yang mengatur terkait hak semua negara dalam melewati perairan teritorial bahkan dengan kapal perang. UNCLOS secara teoritis telah mengamankan penggunaan negosiasi atau

---

<sup>28</sup> Christian Le Mièrè, *Maritime Diplomacy in the 21st Century: Drivers and Challenges* (New York: Routledge, 2014),hal 7

<sup>29</sup> Christsian Le Mièrè, hal. 86



mekanisme penyelesaian sengketa secara damai.<sup>30</sup> UNCLOS secara bersamaan telah mengurangi penggunaan kekerasan dan mendorong diplomasi maritim sebagai bentuk yang diterima sebagai aktifitas maritim untuk memenuhi tujuan tertentu dari klaim teritorial dan kebebasan navigasi.<sup>31</sup>

### 3. Multipolaritas Power

Munculnya kekuatan-kekuatan baru pasca Perang Dingin menjadi faktor pendukung diplomasi maritim karena adanya multipolaritas power. Sehingga, negara-negara dengan kemampuan militer yang rendah sebelumnya, memiliki keinginan dan kepercayaan untuk menggunakan kekuatannya.<sup>32</sup>

### 4. Perubahan Karakteristik Perang

Terdapat perubahan dalam karakteristik perang oleh negara-negara di dunia. Terdapat tiga tren dalam karakter perang dan tren dalam pengadaan militer yang mendorong penggunaan diplomasi maritim. Secara lebih spesifik; pertama yaitu penurunan tren jangka panjang dari sebuah perang tradisional; kedua yaitu peralihan ke maritim oleh negara-negara maju yang berusaha menghindari kampanye berbasis wilayah darat yang mahal; ketiga yaitu peralihan ke maritim oleh negara-negara berkembang yang berfokus untuk mengamankan kepentingan maritim mereka.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> Christian Le Mière, hal 88

<sup>31</sup> Christian Le Mière, hal 90

<sup>32</sup> Christian Le Mière, hal 91

<sup>33</sup> Christian Le Mière, hal 93

## 5. Perkembangan Ekonomi dan Anggaran Negara

Krisis keuangan global telah berdampak pada praktek diplomasi oleh negara-negara didunia. Di satu sisi, krisis hanya akan semakin mengukuhkan bahwa negara akan tertarik untuk menghindari penguatan kekuasaan di darat karena penghematan biaya. Penghematan bukan sesuatu yang berkembang pesat saat ini namun kendala utama penggunaan diplomasi maritim adalah kemampuan. Dalam meningkatkan kemampuan militer yang lebih maju, menjadi faktor pendorong penggunaan diplomasi maritim yang lebih besar untuk memperkuat sekutu atau memaksa musuh tanpa intervensi.<sup>34</sup>

Faktor pendorong di atas merupakan faktor-faktor yang mendorong sebuah negara memilih untuk melakukan diplomasi maritim. Diplomasi maritim dapat diringkas kedalam tiga kategori yaitu diplomasi maritim kooperatif, persuasif dan koersif. Diplomasi maritim kooperatif memiliki beberapa tujuan berupa membentuk koalisi, membangun pengaruh dan membangun kepercayaan diri. Secara umum bentuk dari diplomasi maritim kooperatif diantaranya bantuan kemanusiaan dan operasi maritim bersama, contohnya kapal Peace Ark milik Tiongkok yang melakukan misi bantuan kemanusiaan di Kenya dan Tanzania pada tahun 2010. Kapal ini mengatur administrasi obat-obatan untuk penduduk kapal.<sup>35</sup>

Diplomasi maritim persuasif atau yang disebut dengan “*showing the flag*” merupakan diplomasi yang bertujuan untuk meningkatkan pengakuan internasional terhadap kekuatan maritim ataupun kekuatan nasional dan membangun nilai tawar

---

<sup>34</sup> Christian Le Mière, hal 97

<sup>35</sup> Christian Le Mière, hal 6

suatu negara dalam ranah internasional. Salah satu contohnya adalah operasi “*Great White Fleet*” yang diperintahkan Presiden Amerika Serikat dengan memerintahkan dua *skuadron battleship* dan kapal perang pengawal mereka untuk melaksanakan pelayaran keliling dunia mulai Desember 1907 sampai Februari 1909. Tujuan operasi ini menunjukkan keinginan pemerintahan Amerika Serikat untuk menunjukkan rasa cinta damai dan kemampuan untuk menjangkau seluruh dunia.<sup>36</sup>

Diplomasi maritim koersif adalah diplomasi yang mencapai tujuannya melalui penggunaan kekuatan angkatan laut. Adapun tujuannya adalah untuk menguasai suatu wilayah. Kapal perang Unyo Jepang yang dikirimkan ke pulau Ganghwa Korea dan menyerang dua pelabuhan Korea, contohnya. Hasilnya adalah sebuah *Treaty of Ganghwa* yang berisi bahwa Korea memberikan wilayah Busan Incheon dan Wusan kepada Jepang untuk digunakan oleh warga Jepang sebagai tempat tinggal dan berdagang.<sup>37</sup>

Berdasarkan pengertian diatas, dari tiga kategori diplomasi maritim yang ada, penelitian ini dinilai lebih relevan untuk menggunakan diplomasi maritim kooperatif dibandingkan dengan diplomasi maritim koersif dan persuasif karena sesuai dengan cara dan tujuan yang ingin dicapai oleh Indonesia melalui penggunaan diplomasi maritim. Berdasarkan visi poros maritim dunia, penerapan diplomasi maritim Indonesia dilakukan melalui peningkatan kerjasama maritim dan penyelesaian sumber konflik di laut termasuk pencurian ikan karena laut sebagai pemersatu bukan pemisah. Indonesia mengutamakan diplomasi maritim yang sifatnya kooperatif untuk

---

<sup>36</sup> Christian Le Mière, hal 12

<sup>37</sup> Christian Le Miere, hal 13

mencapai kepentingan nasional. Hal ini didukung oleh diplomasi maritim yang Indonesia lakukan bukan hanya pada level bilateral tetapi juga pada level multilateral.

### 1.7.2 Diplomasi Maritim Kooperatif

Secara lebih khusus, diplomasi maritim kooperatif memiliki karakteristik:

1. Keterlibatan semua pihak bersifat sukarela.<sup>38</sup> Diplomasi maritim yang dikategorikan kooperatif karena bersifat sukarela bagi pihak-pihak yang terlibat didalamnya.
2. Melibatkan aset maritim.<sup>39</sup> Diplomasi maritim juga melibatkan penggunaan aset maritim yang mampu menggunakan kekerasan. Aspek diplomasi maritim kooperatif melibatkan kapal-kapal yang juga digunakan dalam operasi bentuk lain seperti konflik, pemaksaan dan keamanan. Termasuk di dalamnya adalah kapal-kapal penguasaan laut maritim yang tidak bersenjata yang dapat memiliki peran kuat karena bertindak sebagai lembaga negara dan memiliki jaminan keamanan yang implisit dari pemerintah. Dalam rangkaian diplomasi maritim kooperatif, kapal-kapal semacam itu digunakan dalam kegiatan yang murni damai. *Humanitarian assistance/disaster relief* dan *goodwill visit* merupakan bentuk diplomasi maritim yang melibatkan aset maritim.
3. Dapat melibatkan personil maritim.<sup>40</sup> Definisi yang luas dari diplomasi maritim meliputi keterlibatan personil maritim di berbagai aktivitas. Beberapa bentuk keterlibatan personil maritim meliputi pertukaran personil maritim, program

---

<sup>38</sup> Christian Le Miere, hal 10

<sup>39</sup> Christian Le Miere, hal 11

<sup>40</sup> Christian Le miere, hal 11



pendidikan, *personal visit*, *collaborative meeting*.<sup>41</sup> Selain itu, termasuk di dalamnya bentuk perjanjian-perjanjian antara dua militer yang berguna untuk membangun kepercayaan antara dua militer yang berpotensi bersaing. Para personil maritim bersama dengan pengetahuan dan keahlian mereka merupakan bagian dan paket dari kekuatan laut suatu negara. *Coast Guard* maupun penegak hukum di laut merupakan agensi maritim yang dapat mengambil bagian dalam diplomasi maritim kooperatif.<sup>42</sup>

4. Diplomasi maritim kooperatif berbagi kumpulan tujuan politik yang sama yang ingin mereka tuju.

Karakteristik-karakteristik dari diplomasi maritim kooperatif tersebut memiliki beberapa tujuan. Dalam hal ini, setiap peristiwa dalam diplomasi maritim kooperatif berusaha untuk membangun :

- a. *Soft power/ influence building* (Membangun pengaruh)

Diplomasi maritim kooperatif bertujuan untuk membangun pengaruh positif suatu negara diranah internasional. Penggunaan diplomasi maritim menjadikan suatu negara dapat memberikan pengaruh positif bagi negara-negara lain, dalam hal ini merupakan negara-negara tujuan diplomasi.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Christian Le Miere

<sup>42</sup> Christian Le Miere, hal 10

<sup>43</sup> Christian Le Miere, hal 9

b. *Coalition building* (Membangun koalisi/alianasi)

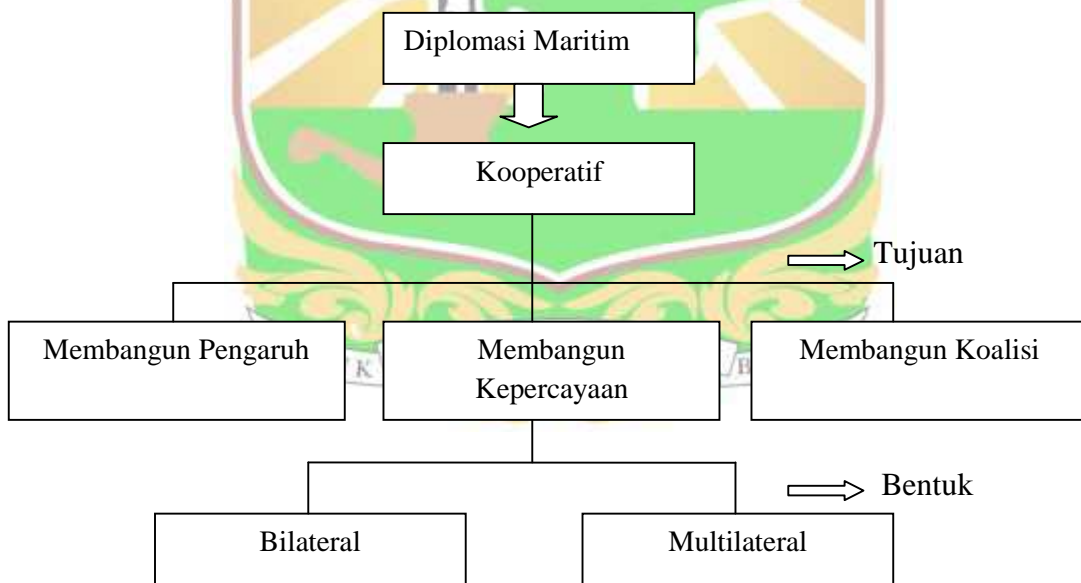
Diplomasi maritim kooperatif dimaksudkan untuk dapat membangun koalisi antar negara termasuk menghindari konflik dan menghilangkan kecurigaan.<sup>44</sup>

c. *Confidence building measures*(Membangun kepercayaan )

Dalam hal ini, aktivitas antar negara dalam bidang maritim dimaksudkan untuk membangun kepercayaan satu sama lain sehingga dapat menghilangkan kecurigaan termasuk menghindari konflik antar negara.<sup>45</sup>

Bentuk-bentuk diplomasi maritim dapat dilakukan oleh negara-negara baik secara bilateral dan multilateral.

**Diplomasi Maritim dan Tujuannya**



**Gambar 1: Diplomasi Maritim Kooperatif dan Tujuannya**

Sumber: Diolah oleh penulis.

<sup>44</sup> Chrsitain Le Miere

<sup>45</sup> Christian Le Miere

## 1.8 Metodologi Penelitian

Metodologi adalah proses, prinsip dan prosedur yang digunakan untuk mengamati masalah dan menemukan jawaban. Metodologi digunakan sebagai pendekatan umum dalam menjelaskan topik penelitian.<sup>46</sup>

### 1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang digunakan dalam menyelidiki, menemukan serta menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari fenomena sosial yang tidak dapat dijelaskan melalui pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan sumber-sumber data yang dikumpulkan dari berbagai sarana.<sup>47</sup> Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan kombinasi pendekatan *literature research* dan *field research*, dimana pengumpulan data dilakukan dengan pengumpulan data-data sekunder berupa data-data yang telah membahas mengenai hal-hal terkait *IUU Fishing* oleh kapal ikan Vietnam di Perairan Indonesia khususnya di Laut Natuna Utara. Untuk *field research*, peneliti melakukan studi lapangan ke Kementerian-Kementerian di Indonesia terkait yaitu Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Badan Keamanan Laut (BAKAMLA).

Jenis penelitian ini adalah penelitian deksriptif-analitis yang digunakan dalam menjelaskan Diplomasi Maritim Indonesia terhadap Vietnam dalam Mengatasi *IUU Fishing* Pada Era Joko Widodo. Jenis penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan permasalahan dalam penelitian. Penelitian ini

---

<sup>46</sup> Deddy Mulyana, *Methodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2001)

<sup>47</sup> Suyanto Bagong dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2007). Hal 166.

dijelaskan lebih rinci melalui ucapan, tulisan, atau perilaku dari individu, kelompok, organisasi atau negara.<sup>48</sup>

### 1.8.2 Batasan Penelitian

Jangkauan waktu penelitian yaitu tahun 2014 hingga tahun 2018. Tahun 2014 dipilih karena pada tahun ini isu *IUU Fishing* mulai meningkat dan serius tepatnya pada masa pemerintahan Joko Widodo dimulai. Tahun 2018 mengikuti data terbaru yang dapat diperoleh.

### 1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis

Unit analisa merupakan unit yang perilakunya hendak dideskripsikan, dijelaskan dan diramalkan dalam penelitian.<sup>49</sup> Dalam penelitian ini, unit analisa adalah Pemerintah Indonesia. Sementara unit eksplanasi adalah objek yang mempengaruhi perilaku unit analisa.<sup>50</sup> Dalam penelitian ini, unit eksplanasi adalah *IUU Fishing* oleh KIA Vietnam di Laut Natuna Utara.

Tingkat analisis adalah cakupan target analisis yang digunakan dalam penelitian untuk mendapatkan gambaran, penjelasan dan perkiraan.<sup>51</sup> Tingkat analisa dalam penelitian ini adalah negara. Menurut Goldstein, tingkat analisis level negara membahas tentang kumpulan kondisi-kondisi domestik suatu negara yang mampu mempengaruhi tindakan negara di dalam arena internasional.<sup>52</sup>

### 1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>48</sup>Gumilar Rusliwa Somantri, *Memahami Metode Kualitatif*, *Journal Sosial Humaniora*, Vol 9 No. 2 tahun 2005. Hal 58.

<sup>49</sup> Mochtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi*, (Jakarta : PT Pustaka LP3S, 1990), hal 35-51

<sup>50</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012). Hal 39

<sup>51</sup>David J Singer, "*The Level-of-Analysis Problem in International Relations*", in *World Politics vol. 14 no. 1* (Hopkins University Press, 1961). Hal 82.

<sup>52</sup>Joshua S. Goldstein dan Jon. C Pevehouse, *Internasional Relation 10<sup>th</sup> Edition*. (USA: Pearson Education. 2014), hal 17.



Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan memanfaatkan data primer dan sekunder. Pertama, data dalam penelitian ini berupa data-data yang didapat dari website resmi KKP sebagai kementerian yang terkait dengan permasalahan IUU Fishing. Pada penelitian ini, data utama yang menjadi sumber data adalah data tentang *IUU Fishing* oleh KIA Vietnam di Perairan Indonesia khususnya Perairan Laut Natuna Utara dan data terkait penenggelaman kapal pelaku *IUU Fishing* yang di peroleh dari website resmi KKP. Selanjutnya, informasi terkait diplomasi maritim Indonesia yang menjadi bagian dari Visi Poros Maritim Dunia oleh Presiden Joko Widodo.

Selanjutnya, dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait dengan topik penelitian. Wawancara dilakukan dengan mengajukan surat permohonan wawancara kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yaitu kepada Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri yang dikirimkan melalui pos. Kemudian surat permohonan juga diajukan kepada Kementerian Luar Negeri (Kemlu) yaitu kepada Direktorat Asia Tenggara dan Direktorat Kerjasama ASEAN, surat tersebut diajukan via email. Selanjutnya, pihak Kemlu dan KKP menerima dan mengarahkan wawancara untuk dilakukan di Jakarta Pusat yakni di masing-masing Gedung Kementerian. Kemudian pihak Kemlu mengarahkan wawancara dengan Andri P Nugroho (Pejabat Fungsional Diplomat dari Direktorat Kerjasama Politik dan Keamanan ASEAN dan Dian Nirmala Sari (Pejabat Fungsional Diplomat) serta Dewi Lestari (Kepala Sub Direktorat) dari Direktorat Asia Tenggara. Kemudian, pihak KKP mengarahkan wawancara dilakukan yakni dengan Andriyanto (Kepala Sub Bagian Kerjasama Asia Pasifik) dari Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri dan M. Ikhsan (Kepala Seksi

Startegi Operasi) dari Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Wawancara selanjutnya dilakukan dengan pihak BAKAMLA yaitu dengan Satya Pratama (Wakil Direktur Kerjasama Luar Negeri). Wawancara dengan BAKAMLA dibantu oleh pihak dari Kemlu. Wawancara via email juga dilakukan dalam penelitian ini yakni dengan Kabaglahta TNI AL melalui Bapak Djoko (Sekretaris Dinas Hukum Angkatan Laut) wawancara ini juga diarahkan dan dibantu oleh pihak dari Kemlu. Data wawancara juga didukung dengan data-data yang dikirim via email oleh Kemlu, KKP dan BAKAMLA.

Sedangkan untuk data sekunder, data yang dianalisis berupa data dokumen, data publikasi, open data resmi, berita online berupa KOMPAS, , CNN Indonesia serta The Diplomat dan Jakarta Post, laporan serta pernyataan elit politik dan data lainnya yang dianggap perlu. Kemudian, data pendukung yang diperoleh dari buku yang berjudul *Maritime Diplomacy in the 21<sup>st</sup> Century: Drivers and Challenge* oleh Chritian Le Miere terkait dengan kerangka konseptual dalam penelitian ini, artikel jurnal yang membahas tentang *IUU Fishing* dan diplomasi maritim, dan sumber terkait lainnya yang mempunyai validitas terkait *IUU Fishing* dan Diplomasi Maritim Indonesia.

### **1.8.5 Teknik Analisis Data**

Analisis data dilakukan sesuai dengan konsep dan teori yang dipakai dan menjadikan data yang ada sebagai indikator untuk konsep yang digunakan dan penelitian dilakukan dengan melakukan analisa terhadap variabel-variabel yang

diteliti.<sup>53</sup> Dalam penelitian ini, analisis di lakukan sesuai dengan konsep diplomasi maritim kooperatif pada kerangka konseptual.

Proses pertama yang dilakukan adalah membaca data dan informasi terkait *IUU Fishing* di perairan Indonesia, kemudian data-data tersebut dikumpulkan dan dipilah sesuai dengan kajian penelitian. Proses selanjutnya yaitu mengumpulkan semua informasi kebijakan Indonesia dalam isu *IUU Fsihing*. Kemudian, mengumpulkan informasi terkait respon-respon dari Vietnam dalam menanggapi kebijakan-kebijakan Indonesia. Langkah selanjutnya yaitu mengumpulkan aktivitas-aktivitas bidang maritim termasuk penggunaan aset maritim ataupun melibatkan personel maritim yang dilakukan Indonesia yang melibatkan Vietnam baik secara bilateral dan multilateral. Pengumpulan data ini dilakukan melalui data yang telah diperoleh melalui wawancara dengan Kemlu, KKP dan BAKAMLA serta TNI AL termasuk dari website resmi lembaga terkait. Kemudian, aktivitas-aktivitas tersebut dielaborasi dengan konsep penelitian untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan penelitian.

#### **1.8.6 Sistematika Penulisan**

##### **BAB I : Pendahuluan**

Bab I merupakan bab yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka, kerangka konseptual, metodologi penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini menggambarkan permasalahan secara keseluruhan

---

<sup>53</sup>John W. Cresswell, "Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches Forth Edition," USA: SAGE Publications, 2014, hal:4

**BAB II : *IUU Fishing* di Perairan Laut Natuna Utara oleh Kapal Ikan Vietnam**

Bab ini mendeskripsikan permasalahan *IUU Fishing* di Perairan Indonesia khususnya perairan Laut Natuna Utara oleh Kapal Ikan Vietnam.

**BAB III : Diplomasi maritim Pada Era Joko Widodo**

Bab ini mendeskripsikan bagaimana diplomasi maritim Indonesia Pada Era Joko Widodo.

**BAB IV : Upaya Diplomasi Maritim Indonesia terhadap Vietnam dalam Mengatasi *IUU Fishing* Pada Era Joko Widodo**

Merupakan bab analisa bagaimana upaya diplomasi maritim Indonesia terhadap Vietnam dalam mengatasi *IUU Fishing* pada Era Joko Widodo. Analisis digunakan melalui penggunaan konsep diplomasi maritim kooperatif untuk menjawab pertanyaan penelitian. Konsep yang digunakan adalah konsep yang dikemukakan oleh Christian Le Miere.

**BAB V : PENUTUP**

Merupakan bab yang berisi kesimpulan serta saran dalam penelitian ini.